

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang *sustainable development goals (SDGs) 16: peace, justice and strong institution* di Pengadilan Agama Tanjung Pati dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB terkait *sustainable development goals 16 : peace, justice and strong institution* sebagaimana yang diatur oleh Perpres No. 59 Tahun 2017 masih tergolong minim dan masih terbatas karena belum adanya sosialisasi resmi mengenai penerapan SDGS ini dari mahkamah agung ataupun dari lingkup pengadilan namun demikian nilai-nilai SDGs 16 ini seperti keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebenarnya sudah terjalankan dengan baik seperti adanya berbagai layanan di pengadilan agama Selain itu hakim juga telah memahami dan menerapkan aturan teknis seperti PERMA, SEMA yang berkaitan dengan pengaturan keadilan, dibandingkan dengan SDGs secara langsung. Oleh karena itu , sosialisasi yang lebih terarah tetap diperlukan agar keterkaitan antara tugas yudisial dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat dipahami secara utuh oleh Pengadilan.
2. Pengadilan Agama Tanjung Pati menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target SDGs 16.1 dan SDGs 16.2. Mediator menggunakan pendekatan spritual, dalam memutuskan perkara perempuan berpedoman kepada PERMA No.3 Tahun 2017 tentang menangani sidang perempuan berhadapan dengan hukum, pembicaraan hak dan perlindungan hukum sejak mediasi dan sesuai dengan kebutuhan yang layak dan tidak lalai, memiliki kehati-hatian

dalam memutuskan dispensasi dengan tetap memperhatikan prinsip *best interest of child* atau kepentingan terbaik bagi anak.

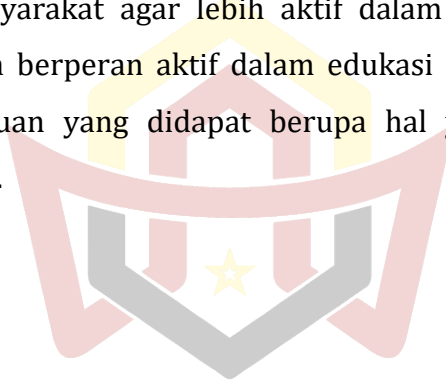
3. Pengadilan Agama Tanjung Pati menunjukkan sejumlah upaya konkret dalam mendukung pencapaian target SDGs 16.3, yaitu dari sisi kepastian hukum, setiap putusan perkara konsisten merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, didukung proses mediasi yang menjaga kesepakatan para pihak tetap sesuai koridor hukum. kualitas putusan terus dijaga melalui pembaruan pengetahuan hukum secara berjenjang dari Mahkamah Agung, dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai rujukan utama, sehingga hakim senantiasa mengikuti perkembangan yurisprudensi terkini. Ketiga, integritas aparaturnya dijaga melalui sistem pengawasan berlapis serta kanal pengaduan SIWAS, yang menjamin independensi hakim dari intervensi pihak manapun. Keempat, kesadaran hukum masyarakat ditingkatkan lewat program edukatif seperti SIMPATIK, sosialisasi *e-Court*, penyuluhan agen perubahan, dan sidang di luar gedung, yang memperluas jangkauan layanan sejak pendaftaran hingga putusan perkara. Kelima, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui SIPP, situs resmi, media sosial, dan WhatsApp, tanpa mengabaikan batas kerahasiaan yang diatur perundang-undangan. Keenam, pemerataan akses keadilan bagi kelompok rentan diupayakan melalui layanan prodeo, Posbakum, dan sidang keliling, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis seperti akses jalan, cuaca, dan rendahnya literasi hukum masyarakat di wilayah terpencil.

Secara keseluruhan, praktik peradilan di Pengadilan Agama Tanjung Pati menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil, konsisten, transparan, dan inklusif bukan sekadar wacana normatif, melainkan telah diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan sehari-hari.

1.2 Saran-saran

Pada akhirnya pembahasan ini terdapat beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan agar aparat penegak hukum pengadilan agama tanjung pati bisa memahami lebih dalam SDGs terkhususnya SDGs 16 juga memahami regulasi yang mengaturnya karena merupakan satu-satunya pilar hukum bagi pembangunan keberlanjutan yang ada di indonesia
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar mahasiswa lebih menggunakan banyak informan bukan hanya terdiri dari aparat pengadilan agama saja namun juga dari para pihak yang berperkara.
3. Untuk masyarakat agar lebih aktif dalam menggunakan layanan hukum dan berperan aktif dalam edukasi hukum agar informasi serta bantuan yang didapat berupa hal yang nyata terjadi di pengadilan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Kementerian Agama RI.
- Aji, S. P., & Kartono, D. T, 2022, *Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals*.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S, 2025, *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(6).
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E., 2018, *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.
- Androff, D., & Damanik, J., 2023, Bangkit di Tahun 2030: Implikasi untuk Implementasi SDGs. Dalam *The Routledge International Handbook of Social Development, Social Work, and the Sustainable Development Goals*.
- Arifin, H., Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, & Ismail, H, 2025, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro)*. *Bulletin of Islamic Law*, 2.
- Arifin, S., 2025, *.Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia., 2022, *Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs)*. BPK RI.
https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf (Diakses pada tanggal 1 mei 2026)

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, *Peran Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Dalam Sustainable Development Goals (SDGS)*.

Cerai, G., Berlaku, P., No, P., & Di, T. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia*

Fordilag AM, Mahkamah Agung, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/super-duper-hemat-dari-panjar-9-juta-cukup-bayar-140-ribu-secara-e-court-di-pengadilan-agama-tanjung-pati#:~:text=Tanjung%20Pati%7Cwww.pa%2Dtanjungpati.go.id.%20Salah%20satu%20upaya%20Pengadilan%20Agama,secara%20e%2DCourt%20ini%20merupakan%20salah%20satu%20program> (Diakses pada 13 April 2026)

Halkos, GE, & Gkampoura, EC, 2020, *Reviewing Usage, Potentials, and*
Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S., 2021, *Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2).

Iqbal, M., Holijah, H., & Hayatuddin, K., 2023, *Peranan Hakim dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Doctrinal*, 8(1).

Jiwantara, F. A., & Medyantara, I. S. (t.t.). *Kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan utang dalam praktek*. Guepedia.

Kaur, M. A, 2024, *Role of the Mediation in Attaining Sustainable Development Goal No . 16 : An Analysis Anusandhanvallari*. 2024.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2024, *Metadata indikator tahun 2024 pilar*

pembangunan sosial: Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs). Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2024, *Metadata indikator tahun 2024 pilar pembangunan ekonomi: Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs).* Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2024, *Metadata indikator tahun 2024 pilar pembangunan lingkungan: Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs).* Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2024, *Metadata indikator tahun 2024 pilar Pembangunan hukum dan tata Kelola: Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs).* Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Limitations of Renewable Energy Sources. Energi , 13 (11).

Mahkamah Agung, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/pengadilan-agama-tanjung-pati-ikuti-rapat-lintas-sektoral-cegah-kawin-anak-27-1> (Diakses pada 13 April 2026)

Mahkamah Agung, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/optimalisasi-pelayanan-untuk-masyarakat-pa->

[tanjung-pati-tambah-kuantitas-pelaksanaan-sidang-di-luar-gedung](#)

(Diakses pada 13 April 2026)

Mardani, 2024), *Teori hukum: Dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer*. Prenada Media.

Miftahussurur, M., Fianto, B. A., Zulkarnain, H., Wahyudi, I., Heriqbaldi, U., Cahyani, P., Fitriani, N., & Karnanta, K. Y. (t.t.). *Handbook SDGs series: Pilar hukum dan tata kelola*. Universitas Airlangga.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram Universiti Press.

Mukhtar, M. A., Shahzadi, K., Niazi, E. K., Fatima, T., & Ahmad, L. , 2024, . *Nexus Among Global Partnership, Quality Education and No Poverty: A Moderated Mediation Investigation Approach*. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 13(3),.

Mutawalli, H. & Abdullah, M. H., 2022, *Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah dan Pendidikan Anak Korban Perceraian di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat*. CV. Alfa Press.

Norma hukum transplantasi jantung di Indonesia, 2022, Indonesia: PT Kaya Ilmu Bermanfaat.

Nurhasnah, N., 2024, *Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama*. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1).

Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2021, 22 Maret, *Visi dan misi*. <https://pa-tanjungpati.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (Diakses pada 6 mei 2026)

Pengadilan Agama Tanjung Pati. "Inovasi SIMPATIK Pengadilan Agama Tanjung Pati Kembali Beraksi." 23 Juli 2021. Diakses pada 17 Mei 2026. <https://www.pa-tanjungpati.go.id/berita-seputar-peradilan/459->

[inovasi-simpatik-pengadilan-agama-tanjung-pati-kembali-beraksi-22-07-21.](#)

Pengadilan Agama Tanjung Pati. (n.d.). YRS. Diakses pada 6 Mei 2026, dari <https://www.pa-tanjungpati.go.id/pelayanan-publik-fasilitas-pengawasan/fasilitas-publik/9-uncategorised/424-yrs>

Pengadilan Agama Tanjung Pati., 2018, *Tugas pokok dan fungsi pengadilan.* <https://pa-tanjungpati.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan> (Diakses Pada 17 mei 2026)

Pristiandaru, D. L., 2023, *4 pilar SDGs di Indonesia.* Kompas.com. <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/03/160000686/4-pilar-sdgs-di-indonesia-> (Diakses pada 28 april 2026)

Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D., 2019, *Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins*, 14 (3).

Puspitasari, A., Witarti, D. I., & Fithriana, A., 2020, *Penanaman Nasionalisme Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Kepada Anak: Perwujudan Konkret Pencapaian Sdgs 16: Program Pengabdian Kepada Masyarakat.* Sebatik, 24(1).

Rachman, I., Retnowati, R., *Implementasi SDGs pada pembelajaran pendidikan lingkungan.* 2022. Uwais Inspirasi Indonesia. Jawa Timur.

Rahayu, N. M., 2024, Dampak Inovasi Industri Pada Pencapaian SDGs di Sektor Energi dan Lingkungan di Indonesia. *Journal of Economics Development Issues*, 7(1).

Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Database Peraturan BPK RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Database Peraturan BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id> PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Republik Indonesia, 2022, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Database Peraturan BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id>

Republik Indonesia, 2022, *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Database Peraturan BPK RI.

Republik Indonesia, 2025, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*.

Ridwan, M., 2022, *Pengadilan Agama Dan Kewenangannya*. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2).

Ruslak, H. roberth kurniawan, & Agustinus, L, 2025, *Mewujudkan Masyarakat Damai Dan Inklusif: Analisis Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam Konteks Hukum Adat Di Indonesia..*

Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D., 2022, *Jurnal basicedu*. 6(4),

Saladin, T., 2017, *Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).

Shilikin, A. D., & Baharuddin, D., 2025, *JSI : Jurnal Studi Islam Vol . 14 No . 1 Juli 2025 P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740 AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740*. 14(1).

Sinaga, F., 2021, *Strategi Mewujudkan Perdamaian Dari Hukum Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*.

Tanjung Pati, 2020, <https://pa-tanjungpati.go.id/pelayanan-publik-fasilitas-pengawasan/layanan-permintaan-informasi/prosedur-keberatan-atas-permintaan-informasi/9-uncategorised/295-pengadilan-agama-tanjung-pati-berhasil-mendamaikan-pasutri#:~:text=Tanjung%20Pati%7C%20www.pa%2Dtanjungpati.go.id.%20Ketua%20Pengadilan%20Agama%20Tanjung.pencapaian%20Pengadilan%20Agama%20Tanjung%20Pati%20mendamaikan%20pasangan> (Diakses pada 13 April 2026)

United Nations., 2015, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

Universitas Islam An-Nur Lampung, 2024, *Hukum keluarga di Indonesia: Pengertian, asas, dan ruang lingkupnya*. <https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/> (Diakses pada 6 mei 2026)

Witarti, D. I., & Fithriana, A., 2021, *Program Pengabdian Kepada Masyarakat : Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak Usia Sekolah Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 16 Target 5.25(1)*

Yunginger, R., Amali, L. N., Kandowangko, N. Y., Amalia, L., Supu, I., Papeo, D. R. P., & Dama, M., 2023, *Potret Awal Pencapaian Sdgs Pilar Pembangunan Sosial Di Kawasan Teluk Tomini*. Penerbit Tahta Media.